UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Oleh :

SITI NURLELA
NIM.4320101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Oleh :

SITI NURLELA
NIM.4320101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurlela

NIM 4320101

Judul Skripsi : **UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025

Yang menyatakan,

Siti Nurlela

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri.

Siti Nurlela Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Siti Nurlela

NIM : 4320101

Judul Skripsi : **UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan,18 Maret 2025

Pembimbing,

Ahmad Rosyid,.S.E.,M.Si.

NIP. 19790331 2006041 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : **Siti Nurlela**

NIM : **4320101**

Judul : **Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**

Dosen Pembimbing : **Ahmad Rosyid, S.E.,M.Si.,Ak.CA**

Telah diujikan pada Hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I	Penguji II
Ade Gunawan, M.M.	RiaAnisatus Sholihah, S.E.,Ak.,MSA, CA.
NIP. 198104252015031002	NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 10 Juli 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H.A.M. Khaliz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa selesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesangupan. Karena, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah : 286)

“Ketahuilah bahwa kemenagan beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dn sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.”

(HR Tirmidzi)

“Kamu tidak perlu menjdai luar biasa untuk memuli, tapi kamu harus memulai untuk mnenjadi luar biasa.”

(Zig Ziglar)

“Pelan atau cepat, yang penting tetap melangkah. Jangan behenti, karena usaha pasti berbuah hasil.”

(Ella)

“Pikiran itu layaknya kemudi arahnya menentukan kemana hidup kita menuju.”

(Ella)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti dari perjuangan, kerja keras, dan kesabaran dalam menempuh pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Setiap lembar yang tertulis di dalamnya adalah hasil dari doa, dukungan, serta dorongan dari banyak pihak yang tidak hentinya – hentinya memberikan semangat. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak M. Rahmat dan Ibu Waidah yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasila penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama Ma, Pa, temani penulis di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis kedepannya.
2. Kepada keluarga dan saudara-saudara saya, teruntuk kaka penulis Sri Intan. Terimakasih atas segala dukungannya, bimbingan serta nasihat yamg diberikan. Terimakasih telah percaya pada penulis. Terimakasih juga untuk adik penulis Dwi Oktapiani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Ahmad Rosyid,.S.E.,M.Si.,Ak.CA yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Wali Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Staff Akademik, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan penulisan skripsi ini, serta memberikan dukungan, arahan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, terkhusus Siti Zulkaidah dan Siti Nur Kholifah yang selau mendukung dan menemani penulis dari awal masa perkuliahan. Dan teman-teman Aliansi Mahasiswa Jabodetabek yang menjadi rumah kedua bagi penulis di perantauan ini. Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah serta penyemangat di kala sulit.
8. Kepada teman-teman seangkatan program studi akuntansi syariah yang telah membantu penulis semasa perkuliahan
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Siti Nurlela. Terimakasih sudah selalu berusaha sebaik mungkin. Terimakasih sudah bertahan dan tetap memilih melangkah walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil sesuai dengan rencana. Terimakasih sudah percaya, berjuang dan tidak menyerah. Terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Semoga segala usaha ini menjadi jalan menuju kebaikan dan keberhasilan. Sehat selalu dan bahagia selalu.

ABSTRAK

SITI NURLELA. Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

WTP merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kewajaran sebuah laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan penerapan yang efektif terhadap Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ketiga aspek tersebut dalam mepertahankan opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Di mana data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, observasi langsung serta analisis dokumen keuangan dan kebijakan internal. Metode analisis data menggunakan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan hasil dari dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan data dari wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejak tahun 2022 membentuk Tim PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang bertugas melakukan pengendalian internal. Laporan keuangan yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemrintahan). Laporan keuangan disusun mulai dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan menggunakan aplikasi SAKTI sejak tahun 2022. Ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Sehingga, Direktrat Jenderal Pemasyarakatan memperoleh opini WTP berturut – turut.

Kata kunci: Opini WTP, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

ABSTRACT

SITI NURLELA. Efforts to Maintain the Unqualified Opinion at the Directorate General of Corrections DKI Jakarta through the Implementation of Internal Control Systems, Government accounting Standards and Agency-Level Financial Application Systems.

WTP is the main indicator used to assess the fairness of a financial report. To maintain the WTP opinion, an effective application of the Internal Control System, Government Accounting Standards and the Agency Level Financial Application System is required. This study aims to analyze how the application of these three aspects affects maintaining the WTP opinion at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights.

This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. Where data obtained through interviews with relevant officials, direct observation and analysis of financial documents and internal policies. The data analysis method uses three steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data validity test uses a triangulation technique where the results of the documentation are tested for validity with data from interviews.

The results showed that the Directorate General of Corrections since 2022 formed the PIPK Team (Internal Control over Financial Reporting) which is tasked with carrying out internal control. The resulting financial statements are also in accordance with SAP (Government Accounting Standards). Financial reports are prepared from the budgeting process to reporting using the SAKTI application since 2022. These three factors are influential in maintaining the WTP opinion. Thus, the Directorate General of Corrections obtained WTP opinion consecutively.

Keywords: Unqualified Opinion, Internal Control System, Government Accounting Standards, and Agency-Level Financial Application System.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.,M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ahmad Rosyid,.S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt. M.S.A., C.A selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Syariah FEBI UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan

7. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan 13
BAB II 15
LANDASAN TEORI 15
A. Landasan Teori 15
B. Telaah Pustaka 24
C. Kerangka berpikir 31
BAB III 33
METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Setting Penelitian 33
D. Subjek Penelitian 35
E. Sumber Data 35
F. Teknik Pengumpulan Data 36

G. Teknik Keabsahan Data 37
H. Metode Analisis Data 38
BAB IV 40
HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Instansi 40
B. Hasil dan Pembahasan 44
BAB V 70
PENUTUP 70
A. Simpulan 70
B. Keterbatasan Penelitian 72
C. Saran Penelitian 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN I
Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian II
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian III
Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara VI
Lampiran 5 Transkip Wawancara IX
Lampiran 6 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan XXX
Lampiran 7 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian LIV
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis LV

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surak Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...◌ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...◌و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ ....ى	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ُ و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيْلَ - qĭla

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأطْفَالُ - rauḍah al-aṭfāl

-- rauḍatulaṭfāl

المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ - al-Madĭnah al-Munawwarah

- al-Madĭnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرّ - al-birr

الحَجّ - al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيْعُ - al-badĭ’u

الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - ta'khużūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

اِنَّ - Ina

أُمِرْتُ - umirtu

اَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَWainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn

وَاَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَWa auf al-kaila wa-almĭzān

Wa auf al-kaila wal mĭzān

اِبْرَاهِيمُ الْخَلِيْل Ibrāhĭm al-Khalĭl

Ibrāhĭmul-Khalĭl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْل Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاس لَلَّذِيْ بِبَكَّتَ مُبَرَاكًا Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsil allażĭ bibakkat amubārakan

شَهْرُ رَمَاضَانَ اَلَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرأنُ Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُ فُق الْمُبِيْن Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubĭn

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubĭn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamĭn

Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb
لِلّٰهِ الْأَ مْر جَمِيْعًا	Lillāhi al-amrujamĭ’an
	Lillāhil-amrujamĭ’an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm

10.Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....25
Tabel 4. 1 Hasil wawancara sistem pengendalian internal 45
Tabel 4. 2 Hasil wawancara standar akuntansi pemerintahan.....53
Tabel 4. 3 Hasil wawancara SAKTI.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 s.d. 2022 3
Gambar 2. 1 Perbandingan SAKTI dengan Aplikasi Eksisting 22
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir 31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi 41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Keunangan 43
Gambar 4. 3 Relasi antar Modul 58
Gambar 4. 4 Pengguna Operasional SAKTI 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian..... II
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian III
Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara..... VI
Lampiran 5 Transkip Wawancara IX
Lampiran 6 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..... XXX
Lampiran 7 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian LIV
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis..... LV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya sektor publik di Indonesia, semakin penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang efektif. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar tata kelola pemerintahan yang efektif dapat terwujud, pemerintah harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Setelah itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan memeriksa data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut untuk menentukan kebenaran, keakuratan, keterpercayaan, dan kejujurannya. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yang mencakup penilaian atas tingkat kewajaran data yang diberikan dalam laporan keuangan pemerintah, akan mensintesis temuan-temuan pemeriksaan (UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), 2004).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diidam-idamkan oleh seluruh entitas pemerintah dari berbagai opini yang dapat diberikan oleh BPK RI. Bagi instansi pemerintah, opini WTP merupakan

sebuah kemenangan dan kebanggaan, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai salah satu tujuan RPJMN. BPK telah memeriksa empat puluh tujuh kriteria. Temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan tahun 2022, pemerintah telah meningkatkan kinerjanya di satu bidang. Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 s.d. 2023 disampaikan pada data berikut:

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [1]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional [6]	WTP	WTP	WDP	[6]	[6]
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara [1]	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(BPK, 2024)

Gambar 1. 1 Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 s.d. 2022

Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang telah memperoleh opini WTP, seperti yang terlihat dari tabel di atas. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kemenkumham sendiri mendapatkan opini WTP secara berturut-turut. Untuk mendapatkan opini WTP, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan opini WTP, Kementerian Hukum dan HAM secara konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Inang Sh, 2023).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah salah satu departemen yang berfungsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, laporan keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat dan pemangku kepentingan akan menilai kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan berdasarkan kinerja unit-unitnya, sehingga persepsi terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan dipengaruhi oleh opini WTP yang diperolehnya. Untuk mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh, Kementrian Hukum dan HAM, khususnya Diektorat Jenderal Pemasyarakatan harus melakukan beberapa upaya. Pengelolaan dan administrasi persediaan dan aset tetap yang masih belum maksimal merupakan salah satu dari sekian banyak area yang membutuhkan perhatian yang signifikan. yang dapat dikelola oleh aplikasi MonSakti utama dalam pelaporan keuangan (Susanti et al., 2022).

Secara ideal, sistem pengendalian intenal sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan, bebas dari kecurangan, serta mampu mengantisipasi risiko sejak dini. Mekanisme pengendalian yang efektif yang diterapkan oleh organisasi untuk menjamin keandalan catatan keuangan dan non-keuangan, seperti kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang akan menjamin pencapaian tujuan organisasi, disebut sebagai sistem pengendalian yang efektif (Enita Binawati, 2022).

Kemudian, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh dan transparan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diikuti ketika menyiapkan laporan keuangan pemerintah, dan penyerahan yang tepat waktu sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi (Jati, 2019). Laporan keuangan Kemenkumham juga bisa mendapat opini WTP karena penyusunan laporan keuangan Kemenkumham khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang sehat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Laporan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah laporan yang terorganisir mengenai status keuangan dan kegiatan suatu lembaga pelaporan. Dalam upaya untuk

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, SAP merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum (Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, 2021).

Untuk mendukung efektivitas SPI dan SAP, pemerintah juga mengembangkan SAKTI sebagai sistem aplikasi terintegrasi berbasis teknologi digital yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara daring dan real-time. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebuah sistem aplikasi terintegrasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, dapat diakses oleh seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Dengan tahap uji coba terbatas (piloting) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 dan nomor 131/PMK.05/2016, SAKTI telah diimplementasikan dengan lebih baik sejak tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang mengubah PMK-159/PMK.05/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentang Pelaksanaan Uji Coba (Muldiyanto, 2021). Mulai tahun 2022, seluruh kementerian dan lembaga di bawah pemerintah pusat harus menggunakan SAKTI secara keseluruhan (full module). SAKTI diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan negara dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan konsolidasi. Selain itu, hal ini akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan laporan keuangan. SAKTI yang diusulkan akan menggabungkan kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan; dalam proses penyusunan

anggaran, fungsi-fungsi tersebut akan digabungkan ke dalam RKAKL, DIPA, dan revisi DIPA (Rinna, 2024). SAKTI juga digunakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk administrasi keuangan, termasuk perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Namun, dalam kenyataannya, belum semua sistem tersebut berjalan secara ideal. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, BPK mencatat 16 temuan yang menunjukkan masih adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah: penerapan SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian memadai; adanya data anomali dalam migrasi persediaan dari e-Rekon&LK ke SAKTI; serta pengendalian reklasifikasi masuk dan keluar pada aplikasi MONSAKTI yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah dibangun secara nasional, masih ada celah dalam implementasi teknis dan pengendalian di tingkat satuan kerja (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, 2023).

Kesenjangan antara idealita dan realita inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Secara normatif, sistem pengendalian internal, SAP, dan sistem aplikasi seperti SAKTI telah disiapkan dan dijalankan. Namun, catatan dan temuan dari BPK serta kondisi pelaksanaan di lapangan mengindikasikan bahwa efektivitas ketiganya masih perlu ditelusuri

lebih lanjut dari perspektif pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan antara harapan ideal dan kondisi riil tersebut menjadi alasan utama pentingnya dilakukan penelitian. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah penerapan SPI, SAP, dan SAKTI benar-benar telah efektif dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan mempertahankan opini WTP? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi ketiga sistem tersebut dijalankan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori stewardship, yang memandang bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana (steward) diberikan kepercayaan, sistem yang mendukung, serta pembinaan yang memadai dari organisasi.

Penelitian Putra & Varina, (2021), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu disusun dengan menggunakan SAP berbasis akrual, dan hal ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya oleh BPKAD. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk memperluas jumlah dan kualitas alat pengelolaan anggaran yang tersedia di setiap OPD dan menyediakan situs web untuk setiap OPD di Kota Bengkulu. Pemantauan yang lebih langsung dari atasan di semua tingkatan juga diperlukan, baik di tingkat kelompok perangkat daerah maupun pemerintah daerah.

Penelitian Gultom & Harahap, (2024), ditarik kesimpulan bahwa

pembuatan laporan keuangan secara khusus dan manajemen keuangan secara umum telah mendapatkan manfaat dari penggunaan aplikasi SAKTI. Namun demikian, SAKTI masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan, pengelola sistem harus memberikan keleluasaan kepada pengguna dalam mengolah data.

Berdasarkan penlitian terlebih dahulu, secara khusus tidak ada yang mengkaji pengaruh tiga variabel yaitu Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansu secara bersama-sama. Banyak penelitian yang hanya memfokuskan pada satu atau dua variabel dalam pelaporan keuangan. Dimana ketiga variabel tersebut juga dapat berpengaruh dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan ketiga variabel dalam satu kerangka penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul **"Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

1 Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?

2 Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?

3 Bagaimana penerapan sistem palikasi keuangan tingkat instansi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP

b. Untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP

c. Untuk menganalisis penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian tentang penggunaan standar akuntansi pemerintahan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan dapat menjadi peta jalan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini diyakini akan memajukan pemahaman kita tentang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah, dengan menentukan bagaimana sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang digunakan dalam upaya menegakkan opini WTP.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami bagaimana standar akuntansi pemerintahan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan sistem pengendalian internal diterapkan dalam upaya mempertahankan opini WTP. Selain itu, pemahaman mahasiswa juga diharapkan dapat bertambah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran untuk

membandingkan aplikasi dan pengetahuan dalam praktik yang sebenarnya dengan teori yang telah diperoleh untuk dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

ii. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham

Studi ini dapat menjadi panduan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan yang efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga dapat mempertimbangkan untuk memperkuat pengendalian internal untuk mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi.

iii. Bagi Pembaca

Mengenai dampak dari penerapan sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam upaya mempertahankan opini WTP, penelitian ini dapat menawarkan bahan tertulis yang dapat diandalkan.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencakup pembahasan metodologis yang menyinggung rencana yang menguraikan atau memperjelas topik dan metodologi penelitian sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Langkah-langkah berikut ini harus diikuti dalam penelitian ini agar sesuai dengan pedoman tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah, berisi mengenai Fenomena sosial disertakan bersama dengan masalah dan urgensi penelitian, alasan obyektif pemilihan lokasi, dan penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian sebelumnya.
2. Rumusan masalah, mengajukan pertanyaan berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian pada latar belakang masalah dan memerlukan jawaban dalam bentuk deskripsi atau pola naratif dari suatu kegiatan penelitian.
3. Tujuan penelitian, tujuan atau hasil yang diinginkan untuk sebuah penelitian.
4. Manfaat penelitian, tujuan penelitian ini dicapai dengan metode teoritis dan praktis.
5. Sistematika pembahasan, kerangka kerja untuk mengatur dan menyajikan data secara metodis dan logis.

BAB II LANDASAN TEORI

1. Landasan teori, mencakup teori-teori yang menyeluruh beserta teori-teori pelengkap untuk memberikan panduan atau parameter bagi penelitian.
2. Telaah pustaka, mencakup sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi temuan-temuan studi yang baru.
3. Kerangka berpikir, menggunakan grafik dasar untuk mengilustrasikan alur proses pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, latar penelitian, demografi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, semuanya tercakup dalam bab ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan-temuan dari analisis data penelitian yang terkumpul disajikan dalam bab ini, bersama dengan diskusi tentang temuan-temuan tersebut yang diinterpretasikan secara sederhana untuk menjawab isu-isu utama yang diangkat dalam perumusan masalah.

BAB V SIMPULAN

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian yang diperoleh dari analisis data dan diskusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, bersama dengan daftar kekurangan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan merujuk pada hasil penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dalam Mempertahankan Opini WTP : Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM" dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sistem Pengendalian Internal sangat penting dan berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Sistem peengendalian internal mengawasi laporan keuangan dari awal penganggaran sampai dengan pelaporan. Pengendalian internal ini memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang diterapkan. Sistem Pengendalian Internal dapat mecegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan Kemenkumham yang memperoleh opini WTP 15 kali berturut – turut. Namun, efektivitasnya masih beragam antar unit kerja, tergantung pada pemahaman dan kesadaran masing-masing pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan memuat prinsip – prinsip akuntansi yang dimana menjadi pedoman dalam menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah. Sehingga Standar Akuntansi Pmerintahan ini

3. berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, risiko kesalahan dalam menyusun sebuah laporan keuangan dan dihindari. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektifnifi tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal serta tranparansi laporan keuangan. Namun, pemahaman teknis atas isi laporan seperti LO, LPE, dan LPSAL masih belum merata. Ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai perlu terus diperkuat.
4. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi juga berpengaruh dalam mempertahanknan opini WTP. Meskipun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi signifikan berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP, masih terdapat faktor lain yang lebih penting dalam memperthankan opini WTP. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan akomodir dari pihak ketiga yaitu Kementrian Keuangan. SAKTI hanya mengakomodir bahwa data tersaji secara real. Tetapi, dengan adanya SAKTI sangat membantu dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan SAKTI sudah terintegras dan mudah diakses. Sehingga semua transaksi tercatat dengan jelas. Namun, tantangan berupa keterbatasan pelatihan dan kendala teknis seperti jaringan internet masih menjadi hambatan di lapangan.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa batasan mungkin perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penelitian mereka, berdasarkan pengalaman peneliti selama proses penelitian. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dari penelitian ini:

1. Dibandingkan dengan rencana awal peneliti, yang seharusnya memakan waktu sekitar tiga bulan, pelaksanaan penelitian ini mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan kesibukan para informan yang cukup padat, sehingga menyebabkan beberapa kendala dan penundaan dalam proses penelitian.
2. Objek penelitian ini hanya berfokus pada satu instansi saja. Temuan-temuan dari penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lainnya atau organisasi pemerintah lainnya karena penelitian ini terbatas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Mungkin terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini WTP yang tidak dapat diukur atau tidak tercakup dalam analisis, seperti pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja laporan keuangan, seperti perubahan peraturan pemerintah atau situasi perekonomian.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya diantaranya:

1. Untuk membandingkan hasil temuan dan memberikan gambaran yang

lebih lengkap mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sebanding di beberapa instansi pemerintahan yang berbeda.

2. Penelitian di masa depan harus mempertimbangkan variabel-variabel eksternal seperti kebijakan pemerintah terbaru, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi terkait yang mungkin berdampak pada opini WTP.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. *6*(1), 974–980.

Anita Sari, A. W. L. (2022). *ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN KINERJA SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)*. *7*(2), 59–66.

Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). *Jambi Accounting Review (JAR) PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN , KOMPETENSI SUMBER DAYA*. *1*(April), 44–62.

Arsyam, M. (2021). *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*.

Asmawanti-S, D., & Soya, M. (2023). Analisis Bibliometrik Good Government Governance di Indonesia dari Tahun 2015-2020. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, *12*(1), 21–38. https://doi.org/10.30591/monex.v12i1.3760

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia*, 1–185.

Benny Eko Supriyanto. (2024). *Evaluasi Efektivitas Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Indonesia*.

BPK. (2024). *lkpp_2023_1717473749.pdf*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Direktorat jenderal pemasyarakatan*

kementerian hukum dan ham.
Ditjenpas. (n.d.). *Profil Organisasi*. https://www.ditjenpas.go.id/profil-

organisasi Djpb Kemenkeu. (2019). *SAKTI, Dukungan Teknologi untuk Fungsi Treasury*.

Djpb Kemenkeu. (2022). *Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3842-peluncuran-sakti-tandai-integrasi-sistem-pengelolaan-keuangan-pemerintah.html

Enita Binawati, C. T. N. (2022). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. *112*, 19–39.

Felisianus Efrem Jelahut. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif John. W. Creswell*.

Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, *8*(1), 300–313. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846

Humas Kemenkumham Jakarta. (2024). *Tertib Pelaporan Keuangan Melalui Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan*. https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/tertib-pelaporan-keuangan-melalui-penerapan-pengendalian-intern-atas-pelaporan-keuangan

Inang Sh, A. S. (2023). *Kemenkumham Raih Opini WTP 14 Kali Berturut-turut*. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/15581361/kemenkumham-raih-opini-wtp-14-kali-berturut-turut-yasonna-jelaskan

Ismail, M. R. N. H., & Sasmito Jati Utama. (2022). Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, *25*(2), 102–109. https://doi.org/10.30649/aamama.v25i2.144

Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, *22*(1), 1–14. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145

KPPN Kotabumi. (2021). *Modul-Modul Dalam SAKTI*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/sakti/mengenal-sakti/modul-modul-sakti-web.html

Lina Rosana, R. W. B. (2023). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*. *3*(1), 23–34.

Maharani, Y., & Sari, R. (2021). *Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang*. *2*(1), 97–103.

Muharman, B. (2022). *SAKTI, terobosan dalam sistem pengelolaan keuangan negara*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/2979-sakti,-terobosan-dalam-sistem-pengelolaan-keuangan-negara,-aplikasi-tanpa-sekat-ruang-dan-waktu.html

Muldiyanto, W. B. Y. (2021). *Mengenal Secara Singkat Perjalanan Waktu Piloting SAKTI Sampai Dengan Implementasi Berdasarkan Peraturan*

Menteri Keuangan. https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan- yogyakarta/artikel/mengenal-secara-singkat-perjalanan-waktu-piloting-sakti- sampai-dengan-implementasi-berdasarkan-peraturan-menteri-keuangan- 568022

Neli Sri Mulyati, Eva Faridah, B. P. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *1*(1), 60–71.

Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I. M. S. (2021). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Pengendalian Intern , Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem*. *1*(4), 1125–1134.

Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Sistem Informasi Akuntansi , dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *10*(1), 48–58.

Panudju, A. T., Bhayangkara, U., Raya, J., Purba, F., Mangkurat, U. L., Nurbaiti, S., Kesehatan, P., Semarang, K., Kalalinggi, S. Y., & Raya, U. P. (2024). *Metodologi penelitian* (Issue February).

Permata, N. R., & Dethan, M. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Maumere. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *9*(1), 88–95. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3862

Permata, R. (2021). *Implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (sakti) di kpp pratama mojokerto*.

Prayitno, P. B. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)*. 1–23.

Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah*. *3*(2), 44–58.

Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *1*(2), 85–98. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071

Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Persfektif Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(1), 110–123. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.223

Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesian Journal of Research in Economy*, *1*(2), 116–124. https://etdci.org/journal/ijre/article/view/526

Rinna, R. (2024). *Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Terhadap Efektivitas , Kinerja Pengguna Dan Dampak*

Pada Kualitas Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur. *1*.

Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. *3*, 9680–9694.

Siti Rahmawati,Cris Kuntadi, R. P. (2023). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SOSIALISASI PELAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH, PENYETARAAN PELAPORAN PADA KANTOR DESA KARANG SATRIA*. *3*(4).

Susanti, A., Riadi, S., Sang, U., Ruwa, B., Keuangan, P., Intern, P., & Akuntansi, S. (2022). *Pembinaan Satuan Kerja Direktorat Jenderal*. *3*(1).

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. *1*(1), 53–61.

Tri Hadi Putra. (2020). *Pengendalian Internal*. https://www.ditjenpas.go.id/kadivmin-sultra-sosialisasikan-pengendalian-internal-di-rutan-unaaha

Usman, K. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo*. *10*(1), 84–93.

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1). (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasa r-

modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo

Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. *7*, 2896–2910.

Wiranti, W. P. (2021). *PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN , TEKNOLOGI INFORMASI*.

Yusriwati, N. S. (2022). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. INHIL)*. *11*(1), 34–44.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Siti Nurlela
NIM	: 4320101
Jurusan/Prodi	: Akuntansi Syari'ah
E-mail address	: sentanaela@gmail.com
No. Hp	: 082246550951

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐Tugas Akhir ☐Skripsi ☐Tesis ☐Desertasi ☐Lain-lain (.....)

yang berjudul :

.....

Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2025

SITI NURLELA

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD